

Hoax Detection Program: Pendampingan Analisis Literasi Digital Konten *Hoax* untuk Majelis Taklim Muslimah di Jawa Tengah

¹Mundhir; ²Djurban

^{1,2}UIN Walisongo Semarang

¹mundhir@walisongo.ac.id; ²djurban@walisongo.ac.id

Abstrak

Hoax dan fakta adalah dua hal yang berbeda tapi sering salah tebak. Keterbatasan informasi, identifikasi dan adanya keinginan berbagi informasi menjadi faktor utama hoax begitu mudah menyebar di tengah masyarakat. Majelis taklim muslimah di Jawa Tengah sebagai pusat kegiatan keagamaan ibu muslimah menjadi tempat diseminasi gagasan anti-hoax yang efektif karena selain menjadi forum kajian keagamaan dan spiritualitas, majlis taklim memiliki peran untuk penguatan persoalan sosial termasuk gerakan deteksi hoax. Proses pengabdian ini berlangsung dalam tiga tahap: assessment lapangan, FGD tentang literasi digital dan wawasan hoax, pelatihan dan pendampingan mengenai literasi digital untuk mendeteksi hoax serta tindak lanjut. Ada beberapa hasil dari pengabdian ini, antara lain subjek dampingan merupakan vulnerable communities dalam konteks informasi digital, dimana rentan usia didominasi 50-60 tahun yang memiliki kecakapan literasi digital rendah. Setelah program dampingan dilakukan, terjadi peningkatan kemampuan dalam proses deteksi hoax.

Keyword: *Majlis Taklim; Hoax; Literasi Digital*

A. Latar Belakang

Berita palsu (*hoax*) menjadi bagian dari sumber informasi masyarakat. Mereka sulit membedakan antara berita berbasis fakta dan berita palsu. Survey yang dilakukan oleh Mastel tahun 2017 menunjukkan bahwa 44,3% dari 1.146 responden menerima *hoax* setiap hari. Bahkan, 17,2% menerimanya lebih dari sekali setiap hari.

Lebih dari itu, media yang menjadi rujukan informasi, terkadang menjadi media penyebar *hoax*. Dari media mainstream, ada potensi melakukan publikasi *hoax*. 1,20% dari radio, 5% dari media cetak dan 8,70% dari media televisi.

Selain media konvensional, media baru (*new media*), seperti media online juga berkontribusi menjadi medium *hoax*. Mastel memaparkan, situs web menyumbang 34,90% penyebaran *hoax*; aplikasi komunikasi online seperti aplikasi Whatsapp, Line dan Telegram mencapai 62,80%. Sementara media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Path menjadi media *hoax* terbanyak dengan intensitas dengan capaian angka 92,40%. Kementerian Komunikasi dan Informasi, pada tahun 2016, merilis, 800 ribu web terindikasi menjadi medium *hoax* dan ujaran kebencian (*bate speech*).

Pada bulan Maret 2017, beberapa media baru, termasuk group WA dan media sosial, diramaikan oleh berita tentang beberapa kasus penculikan anak. Informasi tentang penculikan, pembunuhan dan kejahatan lain, menyebar melalui pesan singkat online dan media sosial. Orang yang diculik dilaporkan memiliki bagian tubuh dilepas dan dijual dengan harga tinggi pasar gelap. Hal ini menyebabkan kecemasan.

Pesan tersebut bermula dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Ada laporan, seorang pria, berpura-pura sakit mental. Ia membawa seorang anak di karung di sebuah daerah bernama Pojok, Kota Cimahi. Pesan tersebut mendorong orang, terutama warga yang mempunyai anak berusia di bawah 10 tahun, selalu waspada menjaga anak untuk tidak berada di luar rumah. Pesan tersebut disertai dua foto. Foto pertama menggambarkan pencuri yang diikat tangannya. Sementara itu, foto yang kedua menjelaskan beberapa anak yang tangan dan kakinya terikat. Kapolres Cimahi, AKBP Ade Ary Syam Idradi, dengan sigap merespon hal tersebut dan mengatakan bahwa kabar tersebut *hoax* dan tidak benar. Ia menjelaskan, "Kami mengimbau kepada masyarakat Kota Cimahi dan sekitarnya bahwa apabila mendapatkan broadcast (pesan berantai) tentang berita penculikan itu, kami konfirmasi berita tersebut adalah *hoax* yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab", (Nazmi, 2017)

Pesan serupa, terjadi pada tahun 2016, Pondok Labu dan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pesan itu menyebutkan, jika ada seorang anak di Jagakarsa yang jadi korban penculikan dengan kondisi

ginjalnya sudah diambil oleh penculik. Berdasarkan informasi dari Kapolsek Jagakarsa Kompol Sri Bhayangkari, belum ada laporan masuk ke polisi terkait informasi adanya penculikan, baik dari pihak rumah sakit, maupun pihak korban. Hasil investigasi Polsek Jagakarsa ke pihak RS Zahirah, tidak ada pasien dengan ciri disebutkan sebelumnya tengah mendapat perawatan (Sumantri, 2016).

Pada konteks politik, konten *hoax* semakin banyak pada saat pesta demokrasi, seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. *Hoax* menyebar di masyarakat dengan masif. Dewan Pers Indonesia menyatakan bahwa *hoax* pada masa-masa pemilu mengalami peningkatan signifikan. Beberapa jenis konten berita seperti berita satir yang isinya menyindir sampai menghujat. Konten tersebut dipublikasikan melalui berbagai kanal informasi. *Hoax* menyebar ke media sosial dan disebarkan di media mainstream tanpa melalui klarifikasi (Jemadu, 2017).

ComScore (2016) merilis laporan bahwa WhatsApp adalah aplikasi seluler paling populer di Indonesia. Ia memiliki 35,8 juta pengguna, yang memiliki pengguna aplikasi terbanyak di Indonesia, dan aplikasi yang sering digunakan, setelah Facebook dan LINE. Dibandingkan dengan email, WhatsApp memfasilitasi pertukaran informasi lebih cepat, dan jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan menggunakan WhatsApp sekitar delapan jam sebulan. Laporan ini menunjukkan keunggulan WhatsApp daripada aplikasi obrolan lainnya, seperti Blackberry Messenger dengan 34.7 juta pengguna, dan LINE dengan 27,6 juta pengguna (Pratama, 2017).

Accenture, bekerja sama dengan Majalah Femina, mengungkapkan bahwa sebagian besar wanita menggunakan internet untuk koneksi sosial. Sebuah studi dari Liliek dan Samudi (2017) menunjukkan bahwa peringkat Indonesia kedua dari 31 negara terbawah tentang pemanfaatan literasi digital. Dari posisi itu, kecakapan literasi digital pria cenderung lebih tinggi daripada wanita. Accenture juga menegaskan, wanita digambarkan lebih tertarik dalam hubungan sosial, sementara pria lebih rajin mencari informasi terbaru.

Majlis taklim muslimah menjadi lembaga keagamaan strategis dalam upaya penguatan nilai-nilai agama, juga untuk merespon terhadap massifnya publikasi *hoax* dan ujaran kebencian.

Ibu-ibu yang terlibat dalam majlis taklim, memiliki peran penting dalam memberi pendidikan kepada anak, mendampingi suami, sekaligus sebagai kontrol sosial dalam komunitasnya. Oleh karena itu, pemberdayaan majlis taklim sebagai lembaga keagamaan bisa berfungsi sebagai ruang belajar untuk menganalisis konten-konten berita palsu (*hoax*) dan menjadi garda terdepan mengedukasi keluarga dan masyarakat tentang pentingnya membangun kesadaran dan kecakapan literasi digital.

Pengabdian ini dimaksudkan untuk mengembangkan analisis literasi digital dan merespon konten berita bermuatan *hoax* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan database digital sebagaimana berikut:

1. Membekali anggota majlis taklim kecakapan untuk menganalisis konten berita bermuatan *hoax* dengan basis kecakapan literasi digital.
2. Membekali anggota majlis taklim kecakapan untuk merespon konten berita bermuatan *hoax* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan database digital?
3. Membangun gerakan bersama untuk mengkonter *hoax*.
4. Membangun kesadaran literasi digital berbasis pada nilai-nilai Islam yang dianut dan diajarkan melalui forum majlis taklim.
5. Mendorong terbentuknya forum komunikasi majlis taklim muslimah yang memiliki kecakapan deteksi dini berita *hoax*.

Pelaksanaan pendampingan ini difokuskan pada empat program:

1. Penyusunan materi yang berisi teknik dan strategi analisis literasi digital dengan konten *hoax*. Hal ini meliputi: (a) *mind mapping* materi; (b) pengumpulan materi; (c) penulisan materi; (d) cetak materi.
2. Pelatihan/workshop tentang “Hoax Detection Program”. Fokus workshop ini meliputi: (a) pelatihan, berupa hal-hal teoritis dan

- implementatif menyangkut media baru (*new media*) dan *hoax*; (b) diskusi dan sesi bicara, berupa diskusi pengalaman anggota majlis taklim ketika menjumpai *hoax* dan teknis meresponnya; (c) eksplorasi, analisis dan simulasi, berupa penerapan materi pelatihan dalam diskusi kelompok dan simulasi analisis berita-berita dengan konten *hoax* guna meningkatkan kemampuan paradigmatik dan teknik mereka.
3. Pendampingan setelah kegiatan. Tujuan utamanya adalah tindak lanjut setelah kegiatan Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan yang telah dilaksanakan. Untuk mengetahui keberlanjutan program penelitian transformatif ini dengan *output* berupa:
 - a. Pengembangan sistem aduan *hoax* berbasis whatsapp dan web. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan partisipasi anggota majlis taklim dalam merespon *hoax*. Laporan tersebut akan diinput secara otomatis dalam sistem yang dibangun, kemudian akan diolah oleh tim, kemudian hasil analisis komprehensifnya akan dilaporkan kembali kepada pihak yang memberi informasi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam mengkonter *hoax*.
 - b. Membuat gerakan Anti-Hoax. Fungsinya, sebagai wadah komunikasi, diskusi dan koordinasi untuk mendeteksi berita dengan konten *hoax* dan meresponnya dengan berbasis kepada nilai-nilai keislaman yang ramah di whatsapp group dan media sosial.

B. Alasan Pemilihan Dampingan

Berdasarkan studi pendahuluan dan wawancara dengan beberapa majlis taklim, baik dari latar belakang sosial keagamaan yang beragam, maka alasan tim pengabdian memilih Majlis Taklim Muslimah sebagai subyek pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Majlis taklim muslimah memiliki multiperan: pendidik dalam keluarga; pekerja; tokoh/anggota masyarakat.

2. Majelis taklim muslimah memiliki peran sosial keagamaan yang signifikan.
3. Majelis taklim muslimah memiliki intensitas komunikasi di ruang digital lebih intens daripada bapak-bapak yang terlibat dalam majlis taklim.
4. Jumlah majlis taklim muslimah sangat besar. Sehingga sangat strategis bila digerakkan secara massif untuk menjadi arus baru konter *hoax* berbasis gerakan lembaga keagamaan paling bawah, sekaligus mendesiminasikan wacana keislaman damai dan moderat.
5. Tipologi majlis taklim muslimah sangat beragam, tergantung pada territorial/geografis, latar belakang pendidikan, sosial keagamaan, afiliasi politik, dan ideologi keagamaan. Sehingga, melihat keragaman tipologi majlis taklim tersebut memberi warna pada gerakan anti-*hoax* di masyarakat.

C. Kondisi dampingan saat ini.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan tim pemberdayaan/pendampingan masyarakat berbasis lembaga keagamaan mendapatkan temuan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Tidak adanya materi/sumber kajian yang mengkaji tentang teknik *tabayyun* digital.
2. Belum memiliki kecakapan menganalisis berita dengan konten *hoax*, baik kecakapan analisis manual, maupun analisis menggunakan sistem informasi dan database digital.
3. Belum adanya kesadaran literasi digital dalam forum majlis taklim muslimah.
4. Belum memiliki ruang pertemuan antar majlis taklim antar kota/kabupaten di Jawa Tengah untuk melakukan pengabdian sosial virtual.

D. Kondisi pemberdayaan yang diharapkan

Pasca kegiatan pemberdayaan, para anggota majlis taklim muslimah diharapkan untuk mengembangkan beberapa program fokus pengabdian sebagai berikut:

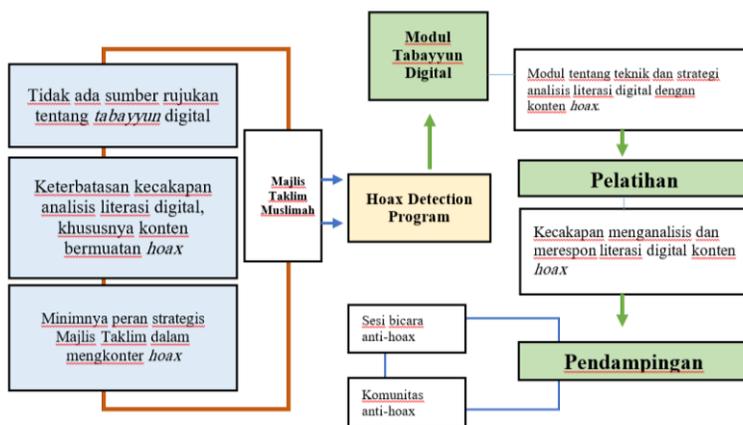
1. Adanya materi/sumber kajian yang mengkaji tentang teknik *tabayyun* digital.
2. Anggota majlis taklim muslimah memiliki kecakapan untuk menganalisis konten berita bermuatan *hoax* dengan basis kecakapan literasi digital.
3. Anggota majlis taklim muslimah memiliki kecakapan untuk merespon konten berita bermuatan *hoax* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan database digital.
4. Sesi bicara anti-hoax. Sesi ini diisi oleh anggota majlis taklim yang sudah mengikuti kelas kurikulum analisis literasi digital. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela oleh majlis taklim di masyarakat di sekitarnya.
5. Komunitas anti-hoax yang mengusung nilai-nilai *tabayyun*, damai dan moderasi yang diinisiasi oleh anggota majlis taklim muslimah. Komunitas ini merupakan wadah komunikasi dan desiminasi peserta program ini untuk diskusi, koordinasi serta berupaya mendesiminasi materi yang diperoleh kepada masyarakat. Selain itu, komunitas ini bersifat terbuka dalam keanggotaan. Karena sifatnya sukarela.

E. Pendekatan

Pengabdian kepada masyarakat berbasis lembaga keagamaan ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research*. Corey (1953) memberi gambaran tentang upaya kelompok masyarakat yang melakukan kajian terhadap persoalan mereka secara ilmiah sebagai upaya untuk mengarahkan, melakukan perbaikan dan evaluasi keputusan dan tindak lanjut. Dalam pelaksanaan pengabdian ini, tim pengabdian terlibat secara penuh dalam pengabdian untuk melakukan proses perubahan ke arah lebih baik.

F. Strategi

Pendekatan ini bersifat partisipatoris. Pemberdayaan/pendampingan masyarakat berbasis lembaga keagamaan ini dilakukan dengan melakukan pendampingan terhadap anggota majlis taklim muslimah. Proses pendampingan ini diawali dengan pelatihan hingga penyusunan materi yang digunakan dalam pelatihan, untuk membekali mereka skill analisis berita hoax. Harapannya, subjek dampingan mampu melakukan analisis terhadap berita dengan konten *hoax*. Sehingga, mereka bisa mengambil andil dan kontribusi nyata untuk melawan berita *hoax*. Strategi ini tertuang dalam kerangka sebagai berikut:



Strategi pendampingan di atas dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan kegiatan, meliputi: (a) pelaksanaan *need assessment*; (b) *Focus Group Discussion* (FGD) guna menentukan subjek dampingan, waktu kegiatan; rancangan materi dan sosialisasi kegiatan.
2. Persiapan materi pelatihan “Tabayyun Digital”, meliputi: (a) penentuan konten; (b) pengumpulan data/materi; (c) penulisan materi dan penyelarasan; (d) cetak materi.
3. Koordinasi pelaksanaan kegiatan, meliputi: (a) pendataan subjek binaan; (b) pengecekan sarana dan prasarana; (c) penataan tempat pelaksanaan; (d) persiapan alat dan bahan

4. Pendampingan terhadap pelaksanaan program, meliputi: (a) pengecekan tingkat pemahaman subjek dampingan; (b) pendampingan terhadap pelaksanaan secara bertahap; (c) dokumentasi program.
5. Evaluasi pelaksanaan kegiatan, dengan melakukan penilaian proses serta hasil.
6. Pendampingan terhadap keberlanjutan kegiatan.
7. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.

G. Pihak-pihak yang terlibat:

1. Majelis Taklim Muslimah di Jawa Tengah. Program ini akan dilaksanakan di tiga kota: (1) Kabupaten Rembang, sebagai representasi masyarakat pesisir pantura, dimana Majelis Taklim yang dilibatkan terdiri atas ibu-ibu yang memiliki latar belakang pendidikan minimal perguruan tinggi, dan sosial ekonomi menengah ke bawah; (2) Kabupaten Magelang, sebagai representasi kota multietnis dan toleran, kota penyangga ibukota propinsi Jawa Tengah, latar belakang pendidikan serta ekonominya minimal SMA/MA sederajat; (3) Kabupaten Kudus, sebagai representasi kota santri dan home industri, dengan latar belakang pendidikan yang beragam, termasuk diantaranya yang dari latar belakang non formal seperti pesantren/madrasah diniyah. Bentuk keterlibatannya adalah mempersiapkan narasumber untuk pelatihan dan pendampingan analisis literasi digital.
2. Pakar Teknologi Informasi, yang akan memberikan pelatihan penggunaan sistem informasi untuk analisis dasar literasi digital dengan konten *hoax*.

H. Hasil Pendampingan

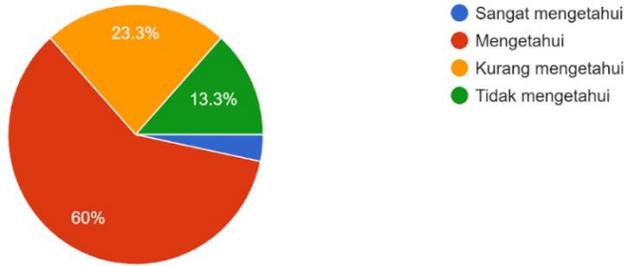
Berdasarkan data di atas, usia paling muda dari subjek dampingan kegiatan pengabdian ini adalah 25 tahun, sedangkan usia paling tuanya yaitu 70 tahun. Sementara itu, paling banyak diisi oleh subjek dampingan berusia 50 tahunan, berikutnya usia 40 tahun, dan

30 tahunan secara berurutan. Oleh karena itu, berdasarkan data usia subjek dampingan tersebut kegiatan ini tepat sasaran karena relevan dengan problem deteksi hoax yang lebih dialami oleh kalangan usia sepuh sebagai konsekuensi dari tingkat literasi digital mereka yang tergolong rendah, tentu dengan berbagai alasan, berbeda dengan generasi milenial yang lebih cakap dalam memanfaatkan teknologi informasi digital.

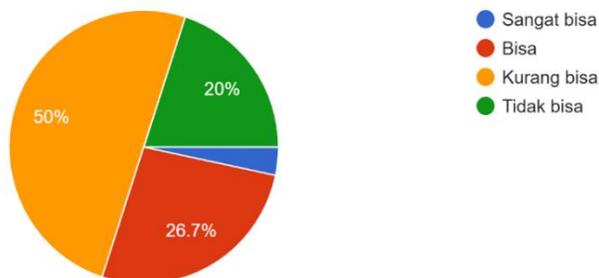
Berdasarkan data, bisa disimpulkan bahwa mayoritas subjek dampingan berlatarbelakang ibu rumah tangga, yaitu 23,3%. Sedangkan berdasarkan pekerjaan formal terdapat yang berstatus sebagai PNS dan wiraswasta. Mereka yang bekerja ini juga terdiri dari pendidik (guru dan dosen), birokrat (pegawai administratif struktural) dan bahkan karyawan (buruh). Oleh karena itu, latarbelakang pekerjaan subjek dampingan dalam pengabdian ini bersifat variatif dan merepresentasikan ragam profesi di tengah masyarakat, khususnya kalangan ibu-ibu. Di bawah ini adalah grafik diversitas subjek dampingan pengabdian ini:

Adapun hasil survei kompetensi wawasan subjek dampingan beserta uraian analisisnya adalah sebagaimana berikut:

1. Hasil survei berdasarkan pertanyaan ini menunjukkan bahwa dari 30 subjek dampingan, 60% menyatakan telah mengetahui pengertian hoax. Sedangkan 23% nya menyatakan kurang mengetahui, disusul dengan 13.3% tidak mengetahui. Data ini paling tidak mengindikasikan dua hal: pertama, bahwa sosialisasi mengenai adanya hoax di dunia digital telah menyentuh kalangan majelis ta'lim yang berbasis ibu-ibu muslimah, yang mayoritas berusia di atas 50 tahun, meskipun belum efektif. Kedua, perihal hoax telah menjadi wacana publik, termasuk di dalamnya kalangan ibu-ibu muslimah. Paling tidak mereka pernah mendengarkan kata hoax. Dari survei ini, juga diketahui bahwa ada 1 dari mereka yang menyatakan sangat mengetahui hoax. Berikut adalah diagram yang menggambarkan pernyataan subjek dampingan tersebut:

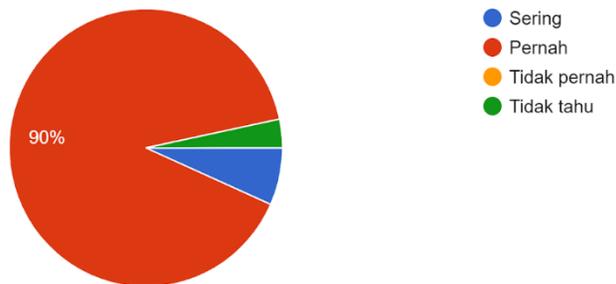


2. 30 subjek dampingan menunjukkan bahwa sejumlah 50% atau 15 subjek dampingan menyatakan kurang bisa membedakan antara konten hoax dan non hoax. Jumlah ini mendominasi jawaban mereka. Sedangkan yang menyatakan bisa sejumlah 26,7%, dan yang menyatakan tidak bisa sejumlah 20%. Jika subjek dampingan menyatakan kurang bisa dan tidak bisa disatukan dalam satu kategori subjek dampingan, maka jumlahnya 70%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas subjek dampingan yang didominasi oleh majelis ta'lim berbasis kalangan ibu-ibu muslimah, menyatakan mengetahui pengertian hoax (60%), namun mayoritas mereka (70%) tidak mengerti tentang cara membedakan antara konten informasi yang hoax dan non hoax. Fakta ini relevan dalam konteks pengabdian berbasis riset ini, dan menarik dalam konteks data literasi digital kalangan majelis ta'lim berbasis ibu-ibu muslimah, bahwa tingkat literasi mereka terhadap konten informasi yang hoax masih rendah. Berikut adalah diagram yang menggambarkan pernyataan subjek dampingan tersebut:



3. Data yang diperoleh menunjukkan 90% atau 27 subjek dampingan menjawab pernah menerima konten berita/informasi hoax, sedangkan hanya 3,3%/1 subjek dampingan yang menyatakan

tidak tahu apakah pernah pernah menerima konten berita/informasi hoax ataukah tidak. Jawaban terhadap pertanyaan ini menunjukkan fakta yang unik, karena jika dihubungkan dengan jawaban pada pertanyaan sebelumnya, mestinya jika mayoritas mereka (70%) tidak mengerti cara membedakan antara konten berita/informasi hoax dan yang non hoax, maka mereka dalam menjawab pertanyaan ini juga harusnya mayoritas menyatakan tidak tahu sebagaimana 1 subjek dampingan yang menyatakan demikian. Namun, mengapa bisa demikian? Hasil *probing interview* yang kami lakukan, menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak mengetahui cara membedakan antara konten berita/informasi hoax dan non hoax, mereka mengerti bahwa sebuah informasi termasuk hoax karena adanya pihak tertentu yang memberikan penjelasan bahwa info yang mereka terima adalah hoax. Hal ini menunjukkan jika identifikasi mereka terhadap konten informasi apakah hoax atau kah tidak, lebih berdasarkan -untuk tidak mengatakan bergantung- pada pihak lain. Berikut adalah diagram yang menggambarkan pernyataan subjek dampingan tersebut:

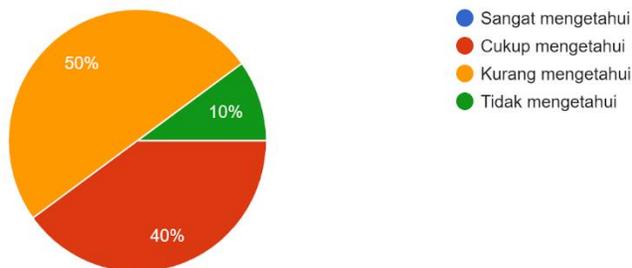


4. Hasil survei menunjukkan bahwa 15 dari 30 subjek dampingan menyatakan kurang mengetahui tujuan penyebar hoax, atau 50% dari total jumlah subjek dampingan. Sementara itu, ada 40% dari 30 subjek dampingan yang menyatakan cukup mengetahui tujuan penyebar hoax dalam menyebarkan berita atau info hoax. Namun demikian, setelah kami meminta secara lebih lanjut kepada subjek dampingan yang menyatakan cukup mengetahui tujuan penyebar hoax, untuk menyebutkan apa tujuan penyebar hoax dalam pengetahuan mereka, ternyata secara seragam mereka

menyebutkan bahwa tujuan penyebar hoax adalah menyebarkan fitnah. Tujuan seperti ini tentu benar adanya namun sangat klise bagi konteks dunia digital. Dalam pandangan kami, jawaban mereka ini sepertinya lebih dilatarbelakangi oleh pengetahuan keagamaan mereka dan pengalaman mereka dalam kehidupan nyata mengenai kabar bohong yang motifnya sering disebut dengan fitnah. Pengetahuan keagamaan dalam hal ini mereka gunakan untuk melihat kesamaan sifat dari hoax dengan fitnah dalam bahasa agama, yang berarti informasi dusta melalui manipulasi kebenaran. Sehingga tujuan pelaku penyebar hoax disamakan dengan tujuan pelaku penyebar fitnah.

Sementara itu, berdasarkan pengalaman yang mereka jumpai, bahwa karena hoax yang sampai ke mereka lebih banyak didorong oleh motif politik dalam sebuah kontestasi, maka hoax tersebut lebih mereka fahami sebagai bentuk fitnah melalui agenda kampanye hitam antar pendukung kandidat dalam sebuah pemilihan pimpinan daerah dan saat pilpres 2019 lalu. Oleh karena itu, dalam pemahaman mereka tujuan dari pelaku penyebaran hoax tidak lain adalah sebagaimana tujuan pelaku fitnah.

Berikut adalah diagram yang menggambarkan pernyataan subjek dampingan di atas:



5. Diantara pelaku penyebaran hoax di media sosial menyatakan bahwa mereka melakukan itu karena tidak mengetahui bahwa info yang mereka sebarkan adalah bermuatan hoax. Prakteknya mereka hanya meneruskan pesan yang mereka terima karena mereka merasa bahwa pesan tersebut bermuatan info positif, baik, dan dinilai bermanfaat. Tindakan sharing info sebelum klarifikasi

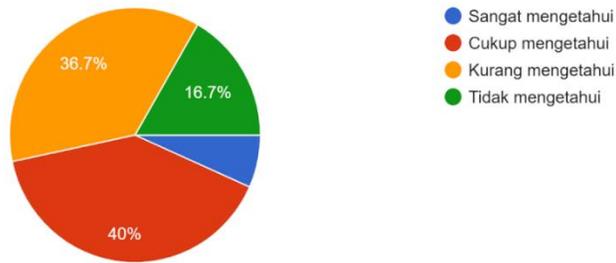
kebenaran konten dalam info seringkali tidak dilakukan karena mereka tersentuh dan tergerakkan secara emosional untuk membagikan info dimaksud. Selain itu, tindakan mereka juga tidak disadari sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi hukum. Dari sinilah, pengetahuan seputar UU ITE sangat penting untuk diketahui semua pihak.

Berdasarkan jawaban 30 subjek dampingan terhadap pertanyaan pada poin ini, maka 40% dari jumlah tersebut menyatakan cukup mengetahui resiko hukum bagi penyebar hoax, sedangkan 36,7% menyebutkan kurang mengetahui dan 16,7% tidak mengetahui resiko tersebut. Berdasarkan prosentase tersebut, bisa dinilai bahwa mayoritas mereka kurang mengetahui (36,7%) dan tidak mengetahui (16,7%) konsekuensi hukum yang bisa diterima oleh pelaku penyebaran hoax di media digital.

Oleh karena itu, pada saat kami menanyakan kepada mereka, apakah mereka pernah menyebarkan berita hoax di group whatsapp? Jawaban mereka mengantarkan pada kesimpulan bahwa hampir setengah dari mereka pernah melakukannya. Alasan utama mereka adalah karena ketidaktahuan bahwa info yang mereka sebar adalah hoax. Sementara itu, meskipun mereka tidak begitu mengerti tentang konsekuensi hukum bagi penyebar info hoax secara pasti dan detail, namun mereka meyakini bahwa ada hukuman bagi pelaku penyebaran berita hoax.

Fakta dalam data bagian ini jika dihubungkan dengan data pada bagian sebelumnya, tentang pengetahuan membedakan hoax dan tidak, maka mengantarkan pada satu tesis bahwa penyebaran hoax terjadi secara cepat dan massif lantaran kebanyakan masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sebuah berita, apakah berita tersebut hoax ataukah tidak? Sekaligus ketidaktahuan mereka tentang konsekuensi hukum bagi penyebar berita hoax dalam UU ITE.

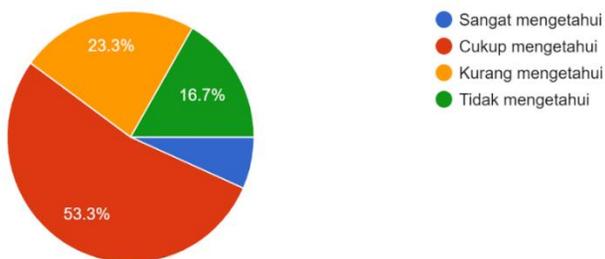
Berikut adalah diagram yang menggambarkan pernyataan subjek dampingan di atas:



6. Ada banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh berita hoax, mulai dampak psikologis, sosiologis dan bahkan politik. Dampak psikologis misalnya pihak yang dijadikan sebagai objek dalam berita hoax tersebut akan mengalami kondisi psikologis yang terpuruk karena merasa karakternya dibunuh. Dampak sosiologis bisa diamati pada terjadinya konflik sosial sebagai akibat dari berita hoax. Begitu pula dampak politis, tidak jarang stabilitas keamanan menjadi terganggu lantaran adanya gerakan tertentu yang dimobilisasi oleh berita hoax.

Subjek dampingan dalam pengabdian berbasis riset ini, 53,3% dari mereka yang berjumlah 30 menyatakan cukup mengetahui efek negatif yang bisa ditimbulkan oleh penyebaran hoax. Sedangkan ada 23,3% yang menyebutkan kurang mengetahui dan 16,7% yang menyatakan tidak mengetahui. Memperhatikan besaran total jumlah dari mereka yang kurang dan tidak mengetahui, maka penting untuk dilakukan curah wawasan kepada mereka mengenai dampak yang bisa ditimbulkan oleh adanya penyebaran hoax. Karena jika tidak, kemungkinan bagi mereka untuk secara tidak sadar atau pun sadar terlibat dalam mata rantai penyebaran berita hoax.

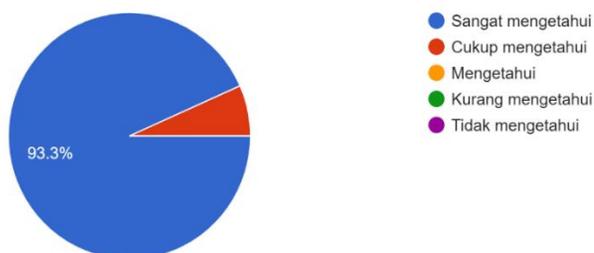
Berikut adalah diagram yang menggambarkan pernyataan subjek dampingan di atas:



Hasil jawaban dari pertanyaan ini menunjukkan bahwa 93,3% dari subjek dampingan yang berjumlah 30 orang menyatakan sangat mengetahui pengertian hoax beserta konsep-konsep yang terkait dengan hoax yang terangkum dalam literasi informasi digital. Sementara itu, sisanya yang berjumlah 6,7% atau 2 orang dari subjek dampingan menyatakan cukup mengetahui.

Data ini jika dibandingkan dengan hasil jawaban mereka saat sebelum mengikuti kegiatan ini, maka perbandingannya sangat jauh. Karena hasil summary jawaban mereka sebelum kegiatan menunjukkan hanya 3,3% atau 1 orang yang menyatakan sangat mengetahui perihal hoax. Sementara itu, mayoritas atau 60% dari subjek dampingan hanya pada level mengetahui.

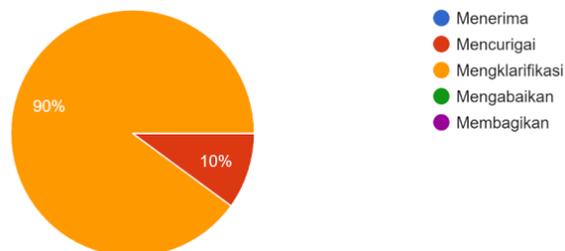
Berdasarkan temuan kami selama proses pendampingan, yang ditopang oleh perbandingan data tersebut menunjukkan satu realitas bahwa hoax sebagai sebuah istilah beserta konsepsi yang melingkupinya dalam konteks literasi informasi digital belum begitu dimengerti oleh masyarakat, khususnya kalangan ibu-ibu muslimah di majelis ta'lim. Pengetahuan mereka hanya pada bahwa mereka pernah mendengar adanya istilah hoax dengan pengertian secara umum yang mereka fahami secara subjektif seperti pemahaman mereka dengan mengasosiasikan hoax dengan fitnah.



Informasi digital yang mengandung unsur hoax seringkali menyebarkan dan menjadi viral sehingga dianggap sebagai kebenaran, karena netizen tidak melakukan penyaringan terhadap setiap informasi online yang mereka terima. Tidak jarang mereka begitu menerima informasi yang menarik bagi mereka, terlebih yang menyentuh sisi emosional mereka, maka dengan tanpa berfikir panjang, mereka membagikan dan meneruskan info yang ternyata bermuatan unsur hoax tersebut.

Pada survei awal sebelum pendampingan kami lakukan, subjek dampingan mengakui jika mereka termasuk pihak yang secara sadar dan tidak sadar telah menjadi bagian dari mata rantai persebaran berita hoax. Hal ini karena mereka lebih mengedepankan sudut pandang positif (*husnudzan*) dan pendekatan emosional setiap kali menerima sebuah informasi, selain itu juga tidak dimilikinya kecakapan dalam literasi informasi digital.

Pada saat proses pendampingan dan pasca pendampingan, mereka melakukan perubahan sikap terhadap setiap informasi yang mereka terima. Jika sebelumnya mereka menerima setiap informasi tanpa mempertanyakan secara kritis, maka setelah mereka mengetahui betapa banyak info hoax yang beredar di media sosial dan online dalam berbagai platform, mereka kemudian menyatakan jika prinsip *tabayun* atau klarifikasi harus mereka jadikan sebagai kacamata setiap menerima informasi digital. Hal ini senada dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa 90% dari 30 subjek dampingan menyatakan akan mengklarifikasi setiap informasi digital yang mereka terima. Berikut diagramnya:

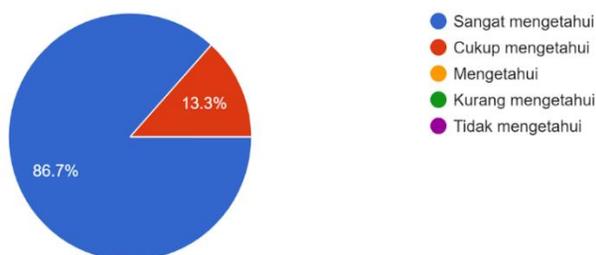


Apabila hasil jawaban subjek dampingan pada saat sebelum kegiatan pengabdian ini kami jalankan menunjukkan bahwa yang

sangat mengetahui dampak yang bisa ditimbulkan dari berita hoax hanya 2 orang atau 6,7%, maka setelah kegiatan ini dilangsungkan jumlah tersebut meningkat menjadi 86,7%.

Pengamatan kami selama proses pendampingan, menunjukkan bahwa sesungguhnya subjek dampingan sudah mengetahui bahaya dari hoax dan dampak yang bisa ditimbulkan, namun mereka menjadi kurang begitu yakin untuk menyatakan pengetahuannya tersebut karena mereka masih belum menyaksikan secara langsung dampak sosial politik yang diakibatkan oleh hoax. Namun, setelah kami memberikan beragam contoh info hoax yang pernah menghancurkan stabilitas keamanan negara, serta dampak dalam skala mikro, mereka menjadi sangat yakin bahwa hoax bisa memberikan dampak kerusakan secara sosial, politik, dan psikologis.

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil jawaban mereka di survei berikut:

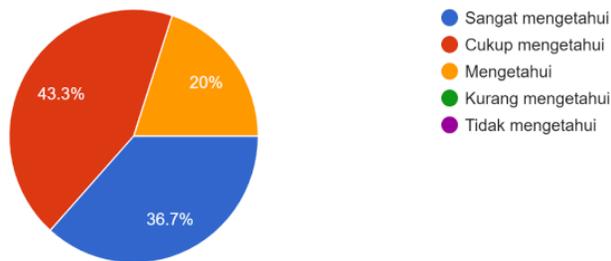


Berdasarkan hasil FGD dengan tim pemateri dan subjek dampingan, maka cara untuk mendeteksi hoax bisa dikategorikan ke dalam dua model: (1) cara instan, dan (2) cara sistematis. Cara instan ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi yang dikembangkan oleh komunitas anti hoax di Indonesia yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Sementara itu, cara sistematis harus dilakukan dengan tahapan *tabayun* digital sebagaimana dalam modul hasil FGD yang dijadikan materi yang dipaparkan pada sesi pelatihan.

Selama proses pendampingan yang kami lakukan, para peserta dampingan menyatakan jika mereka lebih memilih menempuh cara instan dalam mendeteksi hoax, dibandingkan menggunakan cara sistematis. Alasan mereka secara umum lebih bersifat pragmatis, yaitu

karena lebih tidak merepotkan dan mereka tidak kesulitan melakukannya. Meskipun ada kendala yang cukup berarti saat hendak menerapkan cara instan ini, yaitu terkait kapasitas gadget subjek dampingan yang tidak semuanya memiliki kapasitas memory yang memadai untuk instalasi aplikasi.

Sementara itu, pada saat mereka kami berikan ujian untuk melakukan deteksi hoax dengan cara sistematis, kurang dari 30% dari mereka mengatakan kerepotan. Hal ini disebabkan usia mereka yang tergolong lansia, meskipun device nya justru support untuk melakukan deteksi hoax dengan cara sistematis. Fakta ini ternyata sejalan dengan hasil survei yang kami lakukan di bawah ini, bahwa ada 20% subjek dampingan yang menyatakan mengetahui cara mendeteksi hoax dengan cara sistematis. Mereka tidak menjawab cukup atau sangat mengetahui karena tidak ingin melakukan dengan cara sistematis, namun lebih memilih dengan cara instan.



Kesimpulan

Proses pengabdian ini berlangsung dalam tiga tahap: *pertama*, assessment lapangan, yang berisi interaksi penjajakan dengan pimpinan tiga majelis ta'lim di Jawa Tengah untuk memetakan dan menentukan 30 subjek dampingan, dan survei kompetensi wawasan mereka sehingga bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun persoalan yang akan diangkat dalam FGD. *Kedua*, FGD tentang literasi digital dan wawasan hoax, dalam rangka memfasilitasi subjek dampingan mengenali persoalan internal mereka dalam isu literasi digital terkait informasi hoax. *Ketiga*, pelatihan dan pendampingan mengenai literasi digital untuk mendeteksi hoax serta tindak lanjut.

Berdasarkan uraian analisis terhadap temuan yang telah kami paparkan di bagian sebelumnya, maka bisa diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Subjek dampingan dalam program pengabdian ini merupakan *vulnerable communities* dalam konteks informasi digital. Karena meskipun ada diantara mereka yang berusia di bawah 30 tahun namun mayoritas mereka terdiri dari kalangan ibu-ibu muslimah di majelis ta'lim yang berusia lanjut, yaitu 50 hingga 60-an tahun. Oleh karena itu, survei awal kami menunjukkan bahwa secara umum tingkat literasi informasi digital mereka lemah, khususnya terkait wawasan deteksi hoax di ruang digital. Ada banyak faktor yang kami temukan, namun yang paling banyak adalah faktor teknis. Faktor teknis ini terkait dengan kecapakan dalam mengoperasikan dan memanfaatkan fitur-fitur dalam device dan yang tersedia secara online.
2. Secara umum, hoax sebagai sebuah istilah beserta konsepsi yang melingkupinya dalam konteks literasi informasi digital belum begitu dimengerti oleh kalangan ibu-ibu muslimah di majelis ta'lim ketika mereka belum mengikuti program pelatihan ini. Pengetahuan mereka hanya pada bahwa mereka pernah mendengar adanya istilah hoax dengan pengertian secara umum yang mereka fahami secara subjektif seperti dengan mengasosiasikan hoax sebagaimana fitnah. Namun setelah program ini dilakukan, ada peningkatan wawasan hoax yang signifikan.
3. Sesungguhnya tidak mudah mengantarkan subjek dampingan dalam pengabdian ini untuk mampu membedakan konten info yang hoax dan yang tidak. Hal ini dikarenakan untuk melakukan *tabayun* sebuah informasi membutuhkan rangkaian teknik yang bagi subjek dampingan yang mayoritas berusia lanjut terasa begitu memberatkan dan merepotkan, meskipun melalui sebuah aplikasi yang lebih instan sekalipun.
4. Subjek dampingan pada saat sebelum program ini dilakukan, menerima setiap informasi tanpa mempertanyakan secara kritis kebenarannya, maka setelah mereka kami tunjukkan info hoax

yang membanjiri media sosial dan online dalam berbagai platform, mereka kemudian menjadi lebih kritis dalam mengkonsumsi informasi digital dengan prinsip *tabayun*.

5. *Skill* subjek dampingan dalam mendeteksi hoax tidak terlihat optimal. Hal ini terefleksikan dari ujian yang kami berikan kepada mereka untuk melakukan deteksi hoax dengan cara sistematis, bukan instan dengan aplikasi, dimana 20% dari mereka mengatakan kerepotan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh usia mereka yang tergolong lansia, meskipun *device*-nya support untuk melakukan deteksi hoax dengan cara sistematis.
6. Tindak lanjut yang ditempuh oleh 30 anggota dari tiga majelis ta'lim di Jawa Tengah yang menjadi subjek dampingan dalam pengabdian ini adalah pembentukan jaringan muslimah anti hoax di komunitas mereka masing-masing sebagai upaya menangkal beragam kemungkinan penyebaran hoax di tengah masyarakat mereka.

Daftar Pustaka

- Benkler, Y. (2012). *Sharing Nicely. In The Social Media Reader*. New York: New York University Press.
- Boese, A. (2002). The Museum of Hoaxes. Hardcover –November 11, 2002.
- Castells, M. (2002). The Internet and The Network Society. In B. Wellman & C. Haythornthwaite (Eds), *The Internet in Everyday Life*. Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd.
- Pratama, A. B. (2016). Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia. Diakses dari situs [https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebarhoax-di-indonesia/tanggal 14 Agustus 2019](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebarhoax-di-indonesia/tanggal%2014%20Agustus%202019).
- Mastel. (2017). Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional. Diakses dari situs: <http://mastel.id/infografis-hasil-survey-masteltentang-wabah-hoax-nasional/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2019.